



Disbudpar Rogoh Dana Rp 380 Juta Gelar Festival Lovina

Singaraja (Bali Post) -

Kegiatan Festival Lovina tahun 2015 digelar selama lima hari dari tanggal 27 September hingga 1 Oktober 2015. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tahun ini menargetkan 700 ribu kunjungan wisatawan. Melalui Festival Lovina yang merogoh kocek APBD, mencapai Rp 380 juta, diharapkan mampu memberi pemasukan sekaligus menjadi ajang promosi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kadis Disbudpar Drs. Gede Suyasa, M.Pd., Selasa (22/9) kemarin, mengatakan, *event* promosi tahunan bertajuk Festival Lovina 2015 ini temanya "The Peace and Harmony of Lovina". Acara ini akan dihadiri peserta Sail Indonesia 2015. Sebagai tuan rumah, Buleleng sejak awal merancang agenda mengacu RPJMD. Dalam setahun ke depan berupaya keras mendapat target kunjungan 700 ribu wisatawan. "Target kunjungan tidak bisa kami tentukan, tapi acara ini menjadi *event* promosi, untuk menambah daya tarik wisatawan datang ke Buleleng melihat target RPJMD," ujar Suyasa di Kota Singaraja.

Acara festival Lovina, kata Suyasa, dikemas apik dengan

memanfaatkan potensi Buleleng. Di dalamnya termasuk pementasan seni budaya khas Bali Utara, kesenian tradisional unik dan klasik antara lain seperti gerumbungan, tari Sang Hyang Legong Dedari, Sang Hyang Memedi, dan tari Selat Segara Masal. Ketika disinggung dana penyelenggaraan, Disbudpar Buleleng mengeluarkan APBD Rp 380 juta. "Dana yang digunakan dalam festival Lovina itu bersumber dari APBD Buleleng. Dari segi panggung, dekorasi, konsumsi mencapai Rp 380 juta," kata Suyasa yang juga mantan Kepala Bappeda Buleleng ini.

Festival Lovina kali ini melibatkan 20 sanggar dan sekaa. Diikuti 11 grup band, kuliner, dan industri berjejer di pantai. "Dari sembilan desa pakraman, yang ikut parade budaya ada empat desa," ucapnya.

Lebih lanjut, Suyasa mengatakan, pemilihan bulan September sebagai waktu penyelenggaraan, bertepatan dengan kehadiran sail Indonesia. Tercatat peserta reli *yatch* dari Asosiasi Sail Wisata Indonesia (Aswindo) sekitar 44 *yatch rally* terdiri dari berbagai negara. Dari yayaan cinta bahari antar-nusa sekitar 66 *yatch rally*," ujar Suyasa. (kmb34)

Drs. Gede Suyasa, M.Pd.

Bali Post/kmb34

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 11



Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Lemukih

Setujui Penyimpangan karena Kontraktor Cantik

DUA terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng, Selasa (22/9) kemarin disidangkan menjadi satu. Mereka adalah Kontraktor CV Arisya Ayu yaitu Hj. Arisya Agustina dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Wayan Wenten. Jaksa penuntut umum (JPU) Ketut Sujaya dkk. di hadapan majelis hakim diketuai Dewa Suardita dengan hakim anggota Beslin Sihombing dan Hartono menghadirkan sejumlah saksi. Di antaranya mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Nyoman Yasa.

Di depan persidangan, saksi mengaku menyetujui penyimpangan ini terjadi lantaran kasihan dengan kontraktor cantik, yang tak lain adalah terdakwa Arisya. Lelaki yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini, awalnya terkesan bingung. Saat anggota majelis hakim Beslin Sihombing bertanya, dia menjawab tidak tahu apa-apa. "Itu tugas PPK, PPTK pak," jawabnya. Jawaban ini diulang beberapa

kali, hingga membuat Beslin agak berang. Akhirnya, Nyoman Yasa mulai membuka tabir. Dia mengakui bahwa proyek ini memang tidak digarap oleh Arisya selaku kontraktor. Melainkan ada kontraktor lain yang menggarap. "Saya juga mengakui memang pernah bertemu dengan terdakwa Arisya, memberikan izin kalau proyek ini dikerjakan oleh rekanan lain," jelasnya.

"Matilah kau," gertak hakim. Hakim kemudian bertanya, mengapa pemenang tender diberikan izin tidak mengerjakan proyek, sementara malah rekanan lain yang mengerjakan? Saat itulah terucap jawaban polos, "Saya kasihan, kontraktornya cewek. Medan bekerjanya sulit sekali."

Jawaban ini membuat semua yang ada di ruangan sidang tertawa. Apalagi Beslin langsung menyambar dengan mengatakan, apa hubungannya kontraktor cewek dengan medan kerja sulit. "Memangnya digarap sendiri, memangnya cewek tidak kuat. Ini (Beslin menunjuk panitera

cewek), walaupun cewek tetapi pesilat sabuk hitam, hantu pun dimakan," kelakar hakim bersuara keras yang doyan bergurau itu.

Hakim melanjutkan pertanyaan, "Kamu menyetujui dikerjakan rekanan lain, giliran bayar kenapa kamu kasi ke Arisya?" Pertanyaan ini tidak mampu dijawab oleh Nyoman Yasa.

Selain itu, dihadirkan Dewa Merjaya selaku anggota panitia penerima hasil pekerjaan. Dia mengaku tidak pernah melakukan pemeriksaan ke lokasi, namun dia mengakui membubuhkan tanda tangan pada berita acara hasil pekerjaan. Tanda tangan asal-asalan inilah yang dinilai cenderung menghasilkan praktik korupsi. "Kenapa tidak memeriksa berani tanda tangan," tanya hakim. Saksi pun mengutarakan alasan bahwa itu disebabkan atasannya semua sudah tanda tangan. Ya, akhirnya saksi ikut tanda tangan. Atas jawaban itu, saksi terus dikejar berbagai pertanyaan hingga akhirnya tidak bisa bilang apa-apa. (asa)

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 2



Jadi Temuan

Ratusan Bidang Tanah Hibah Pemprov Belum Disertifikatkan

Bangli (Bali Post) -

Ratusan bidang tanah yang merupakan hibah Pemprov Bali kepada Pemerintah Kabupaten Bangli ternyata hingga kini belum disertifikatkan. Hal ini dibenarkan Kepala Bagian Umum dan Aset Setda Bangli I Made Mahindra Putra, Selasa (22/9) kemarin. Dijelaskan, serah terima aset ini dilakukan Pemprov Bali dan Pemkab Bangli pada tahun 2006 silam.

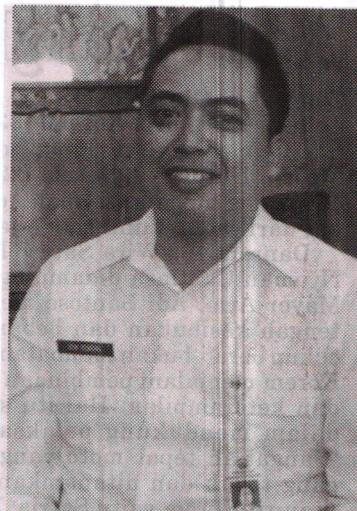
Dalam tanah tersebut berdiri sekolah dasar negeri, yang jumlahnya 161 sekolah. Dari jumlah itu, bagian aset baru menganongi 27 sertifikat dan 27 surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah terdata. "Yang belum kami dapatkan sertifikatnya mencapai 107 sekolah," jelasnya.

Belum adanya sertifikat ini, kata Mahindra Putra menjadi temuan Inspektorat Provinsi beberapa waktu lalu. "Hasil

pemeriksaan inspektorat beberapa waktu lalu ditemukan tanah sekolah ini tidak ada bukti kepemilikan, dalam hal ini sertifikat," jelasnya. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan menelusuri keberadaan sertifikat tersebut ke provinsi. Jika sertifikatnya tidak ditemukan, pihaknya akan melakukan upaya koordinasi dengan BPN Bangli selaku *leading sector* bidang pertanahan dan juga Bagian Pemerintahan Setda Bangli. Jika perlu ada penerbitan

sertifikat baru, tentunya itu akan membutuhkan anggaran. "Kami akan koordinasikan hal ini dengan lembaga terkait. Kalau harus membuat sertifikat baru, tentunya terbentur dengan anggaran. Harapannya 2016 mendatang biar ada anggaran untuk ini," katanya.

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Bangli ini mengaku beruntung lantaran belum adanya sertifikat dari ratusan sekolah ini tidak pernah men-



Bali Post/sos
I Made Mahindra Putra

imbulkan masalah. Di samping belum adanya sertifikat, sejumlah sekolah, masih banyak persoalan aset yang hingga kini belum terselesaikan. Mulai dari GOR yang terbangun di empat kecamatan yang belum diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga saat ini.

Demikian juga dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Bangklet Kayubih yang proses hibahnya baru sampai di Menteri Keuangan. "Proses hibah PLTS ini sudah *on progress*. Tapi karena nilainya lebih dari satu miliar, jadi harus mendapat persetujuan Presiden dan Menteri Keuangan. Sampai saat ini prosesnya sudah sampai di Menteri Keuangan," tambahnya. (kmb45)

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 8



Kemarau Panjang, Embung Seraya Tengah Mengering

Amlapura (Bali Post) -

Kemarau berkepanjangan berdampak luas di Karangasem. Tidak hanya di Kecamatan Kubu, kekeringan juga dirasakan masyarakat Desa Seraya, khususnya Seraya Tengah. Embung di desa setempat sudah mengering. Di tengah tingginya kebutuhan air, embung itu hanya menampung lumpur.

Kondisi demikian terungkap, setelah Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda datang ke lokasi, Selasa (22/9) kemarin. Petugas jaga embung setempat I Ketut Alit mengatakan, embung itu dibangun tahun 1997-1999 yang menelan dana Rp 1,5 miliar dari APBN. Embung ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan air di Desa Seraya yang selalu menjadi

langganan dampak kekeringan ketika terjadi kemarau berkepanjangan. Embung dibangun seluas 2,5 hektar dengan membendung sungai di Seraya. Embung ini dalam situasi normal bisa menampung air dengan volume 100 ribu meter kubik.

Saat berisi air, embung ini dimanfaatkan warga setempat untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari, karena sulitnya PDAM menjangkau wilayah ini. Selain itu, juga untuk minum ternak warga. Keringnya embung Seraya Tengah ini, kata Alit, disebabkan karena mesin pompa air rusak. Menindaklanjuti kerusakan itu, usulan perbaikan alat pompa sudah diajukan ke Provinsi Bali. Namun, belum ada respons. Selain rusaknya pompa

air, embung mengering juga disebabkan kemarau panjang yang mengakibatkan debit air menuju embung menurun sehingga tidak memungkinkan mesin pompa beroperasi meski mesin dalam kondisi bagus.

Camat Karangasem Nengah Danu mengatakan, keberadaan embung ini cukup vital bagi warga setempat. Embung ini sudah dimanfaatkan warga selama 17 tahun. Dengan kondisi saat ini, tentu membuat warga setempat kesulitan memperoleh air bersih. Melihat situasi itu, Penjabat Bupati Ida Bagus Ngurah Arda di-

dampingi Kadis PU Karangasem Nyoman Sutirtayasa meminta petugas setempat menguras lebih dulu embung tersebut. Sebab, embung sudah terjadi pendangkalan, lantaran tertimbun lumpur yang mengalir ke dalam embung melalui air hujan.

Sementara terkait kerusakan pompa, pihaknya mengaku bakal segera berkoordinasi dengan Pemprov Bali. Agar, pompa airnya dapat beroperasi dan embung dalam kondisi bersih. Sehingga, layak dimanfaatkan warga setempat, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (kmb31)

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 7



Rapat Pembahasan Anggaran

Molor Tiga Jam

Amlapura (Bali Post) -

Rapat membahas APBD-P 2015 dengan eksekutif di DPRD Karangasem, Selasa (22/9) kemarin, molor sekitar tiga jam. Palu sidang pun sempat tak ditemukan Ketua DPRD Nengah Sumardi dan gangguan mikrofon mati.

Salah seorang anggota DPRD Karangasem Wayan Sunarta mengatakan, molornya rapat anggaran itu, karena pimpinan dewan dan tim anggaran eksekutif masih ada perundingan atau pembahasan. Perundingan tersebut dalam rangka mensinkronkan anggaran antara yang dirancang eksekutif dengan dewan.

Kata Sunarta, anggota Fraksi PDI-P itu, pembahasan itu terkait adanya rasionalisasi bantuan

hibah uang serta barang yang mencapai sekitar Rp 20 miliar. Dikatakan dengan UU yang baru yakni UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan hibah dan bansos hanya bisa diberikan kepada lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Hibah barang yang dirasionalisasi senilai Rp 7,2 miliar, sementara hibah uang Rp 13 miliar.

Menurut Sunarta, setelah masyarakat tak bisa mendapatkan bantuan hibah karena tak bisa dicairkan, diharapkan hasil rasionalisasi itu diarahkan untuk kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Anggota dewan asal Sengkidu, Manggis itu meminta agar penggunaan anggaran rasionalisasi untuk kegiatan

yang sudah ada pagu indikatifnya sesuai Musrenbang di delapan kecamatan. "Dewan minta agar dana rasionalisasi dari hibah itu diarahkan untuk kegiatan dan mencerminkan asas keadilan dan pemerataan di semua kecamatan. Jangan sampai kegiatan nanti hanya di kecamatan tertentu, sementara kecamatan lainnya masyarakat tetap miskin," ujar Sunarta.

Ketika pimpinan dewan dan sekda masuk ruang sidang, Ketua DPRD Nengah Sumardi hendak membuka sidang. Namun, ternyata Sumardi tak menemukan palu sidang di mejanya. Sejumlah anggota dewan dan eksekutif menduga ada yang sengaja menyembunyikan palu sidang itu. Beberapa saat,

barulah staf setwan membawa palu sidang dan bantalannya dari ruangan sebelah.

Beberapa saat sidang dimulai, ternyata mikrofon tak koneks. Sempat semua mikrofon dewan tak berbunyi, sehingga ada anggota dewan nyeletuk, "Kok sepertinya terus diboikot?"

Sementara pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengeluh karena sudah menunggu sejak pukul 10.00 wita. Mereka yang tak betah menunggu ada yang mengaku kedinginan di dalam ruang ber-AC. Pimpinan SKPD yang sudah tak betah menunggu, ke luar masuk ruangan rapat. Ada juga yang mengusir kebosanan dengan membuka dan bermain dengan

gadget-nya. Di lain pihak, saat pimpinannya berunding, anggota dewan lainnya santai di ruang komisi. Ada juga yang tampak menikmati pijatan wanita sales obat oles yang masuk ruang komisi. Karena rapat lama molor, sementara jam makan sudah tiba, staf setwan mempersilakan pimpinan eksekutif makan lebih dahulu. Ada juga pimpinan SKPD yang mengaku malu, karena belum bekerja, tetapi sudah makan duluan. Namun akhirnya, semua mengambil konsumsi dan asyik menikmati makan siang. Rapat akhirnya dimulai pukul 12.50 setelah pimpinan dewan dan sekda Karangasem Ir. Gde Adnya Mulyadi ke luar ruangan transit di DPRD, usai berunding. (013)

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 7



Sejumlah Embung Meringing

Warga Krisis

Air Bersih

Amlapura (Bali Post) -

Sejumlah embung geomembran di Karangasem airnya tinggal sedikit, bahkan beberapa sudah mengering. Di antara embung geomembran yang sudah kering adalah embung Puragae, embung Datah II di Banjar Kedampal, Datah dan embung di Dukuh, Kubu. Hal itu berdasarkan pantauan sampai Selasa (22/9) kemarin.

Sementara embung geomembran di kaki timur Gunung Agung di Muntig, kata warga setempat Made Getas dan Wayan Remben, airnya tinggal sedikit. Soalnya pada musim hujan lalu embung yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 4 miliar itu tidak penuh airnya. Penyebabnya, pipa penyadap tersumbat endapan tanah serta sampah bekas kebakaran hutan lindung Gunung Agung pada kemarau tahun lalu. "Air embung saat musim hujan lalu berisi setengah kurang, cepat habis. Soalnya pipa penyalur kerap bocor. Pipa bocor karena pecah akibat panas terik, di samping mungkin pipanya tipis," ujar Getas.

Sementara embung geomembran Datah II di Kedampal, musim hujan lalu juga hanya berisi air sekitar 45 cm dari kedalaman embung sekitar tiga meter. Penjaga embung yang dibangun Balai Air Bali Penida Kemen PU di Denpasar dengan anggaran sekitar Rp 9 miliar tahun 2014 itu menyatakan, pada musim hujan lalu, pipa penyadap di lereng Gunung Agung tersumbat sampah dan abu bekas kebakaran hutan lindung gunung. Selain itu, menurut penjaga embung setempat, air

dari pipa penyadap saat hujan lebat tak masuk embung, karena pipa penyadap dengan tembok pembendung tak tepat alias *nyapilir*.

Hal yang sama terjadi pada embung geomembran di Pandan, Dukuh, Kubu, airnya pada musim hujan lalu hanya sedikit. Penyebabnya serupa dengan embung Datah II. Embung di Puragae, plastik geomembrannya sobek saat proyek embung yang dibuat Pemprov Bali itu baru selesai dikerjakan beberapa tahun lalu. Embung di Banjar Bantah Desa Baturinggih, Kubu, hanya bisa dimanfaatkan beberapa KK di dekatnya. Sebagian besar warga di desa tandus itu krisis air bersih, dan mesti dibantu pasokan dari BPBD Karangasem.

Proyek embung di Karangasem dinilai tak efektif mengatasi krisis air bersih untuk warga di Karangasem. Buktinya, meski sudah ada sedikitnya 16 proyek embung, masyarakat masih tetap menjerit krisis air bersih pada musim kemarau saat ini.

Sementara Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda, bersama stafnya kemarin, meninjau embung atau bendungan di Sungai Seraya, Kecamatan Karangasem. Didapati bend-

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 13



TINJAU EMBUNG - Penjabat Bupati Karangasem I.B. Ngurah Arda meninjau air embung di Seraya. Bali Post/ist

ungan yang dibangun pada 1987 pada masa Mensos Nyonya Nani Soedarsono itu, volume airnya menurun akibat kemarau. Air berwarna keruh kecokelatan di bendungan di atas lahan sekitar 2,5 hektar.

Petugas jaga bendungan setempat, Ketut Alit mengatakan, bendungan itu dibangun dengan dana Rp 15 miliar. Tujuannya dulu untuk me-

enuhi kebutuhan air bersih bagi warga Seraya. Namun belakangan setelah ada sambungan pelayanan air PDAM ke warga Seraya, warga yang rumahnya di tepi jalan memanfaatkan air pemerintah itu. Hanya warga yang belum mampu mencari sambungan PDAM ke bendungan untuk mandi atau mencuci pakaian. Ketut Alit mengatakan, mesin

pompa di bendungan itu sudah lama rusak. Pihaknya sudah minta bantuan perbaikan ke Pemprov Bali, tetapi belum ada tindak lanjutnya.

Arda minta Kadis PU Nyoman Sutirtyasa agar direncanakan perbaikan bendungan itu. Sedimen atau endapan lumpur dikeruk, sehingga bendungan kian dalam dan lebih banyak menampung air sungai. (013)

Edisi : Rabu, 23 September 2015

Hal : 13



Target Pajak Rp 84 Miliar

Sampai Agustus

Terealisasi 74 Persen

Tabanan (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Pesedahan Agung pada 2015 dipatok bisa memenuhi target pajak Rp 84 miliar lebih, yang berasal dari sembilan komponen yang kewenangannya ada di daerah. Dari target tersebut, sampai Agustus baru terealisasi Rp 62,5 miliar atau setara 74 persen.

Jika dibandingkan 2014 dengan target Rp 66,9 miliar, angka capaian realisasi pertengahan tahun sudah mencapai 90-100 persen. Ini dikarenakan baiknya kondisi ekonomi saat itu. Peran aktif para wajib pajak memiliki arti penting dalam mencapai target pajak daerah.

"Pencapaian target bergantung ekonomi masyarakat. Lihat saja target 2014 pertengahan tahun, bisa dicapai karena saat itu kondisi perekonomian sedang bagus. Tetapi tahun ini ekonomi lesu, jadi realisasi target naik secara signifikan dan terkesan perlahan," ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Drs. I Nyoman Sudarma, M.Si., Selasa (22/9) kemarin.

Pencapaian target pajak tidak terlepas dari kesungguhan dan konsistensi se-

genap komponen yang terlibat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabanan. "Pajak daerah sangat berkontribusi untuk peningkatan PAD. Pasalnya, peningkatan PAD juga untuk pembangunan Tabanan ke depan," ucapnya.

Menurutnya, penyerapan pajak tergantung proaktif wajib pajak itu sendiri. Artinya, wajib pajak aktif melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Dispenda sendiri telah melakukan upaya jemput bola, agar penyerapan target pajak bisa optimal.

Pajak daerah, kata Sudarma, didapat dari 11 pajak yang dilimpahkan ke daerah. Dua komponen belum memberikan kontribusi sama sekali, yakni pajak galian mineral batuan bukan logam dan pajak sarang burung walet. "Perda pajak galian

mineral batuan bukan logam sudah ada, hanya potensinya yang tidak ada sehingga tidak bisa menambah PAD," jelasnya.

Pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang PAD terbesar selama ini. Sejak 2011 lalu pajak BPHTB ini menjadi kewenangan daerah, dan hingga kini cenderung menjadi penyumbang terbesar dari sejumlah sektor Wajib Pajak (WP) untuk PAD Tabanan. Sampai Agustus ini saja sudah terealisasi 90 persen dari target Rp 25 miliar," bebernya

Meski kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun, itu tidak mutlak bisa dipakai patokan untuk tahun berikutnya. "Kami tidak pernah tahu siapa yang akan menjual hotel atau lainnya yang menjadi penyumbang

Edisi : Revisi 23 September 2015

Hal : 14



Sambungan - - -

bagi pajak BPHTB ini," tu-
turnya.

Selain penyumbang WP yang bersumber dari BPHTB, PAD Tabanan juga dihimpun dari pajak hotel Rp 11,5 miliar dari target Rp 16,9 miliar, pajak penerangan jalan (pajak penggunaan listrik) target 14,4 miliar sudah tercapai Rp 11 miliar (77 persen), dan PBB dari target 13,6 miliar baru tercapai Rp 6 miliar (44 persen). "PBB realisasinya masih kecil karena masih dalam proses pembayaran oleh para wajib pajak hingga akhir Oktober. Mereka biasanya numplek membayar pada hari terakhir," ucap Sudarma. (kmb28)



I Nyoman Sudarma

Bali Post/kmb28